

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis berdasarkan lima aspek dalam perspektif *what's happening* diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Wage Purwokerto dalam Meningkatkan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas tidak sepenuhnya berjalan optimal. Sistem pemungutan retribusi pelayanan pasar manual masih menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pertama, program kebijakan cukup rumit karena melibatkan banyak aktor didalamnya sehingga peran dan tupoksi tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal. Kedua, kejelasan tujuan target retribusi sudah dibuat jelas mengacu pada petunjuk pelaksana namun data perhitungan potensi pasar khususnya untuk pedagang pelataran kurang lengkap sehingga sulit untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Ketiga, pelaksana kebijakan masih kesulitan menerapkan isi kebijakan berupa sanksi administrasi dan pencabutan SPP/pembatalan surat perjanjian sehingga ditemukan banyak pedagang yang melanggar ketentuan pemanfaatan fasilitas pasar, sedangkan ketersediaan fasilitas pasar cukup memadai namun masih perlu peningkatan kualitas fasilitas pasar. Keempat, partisipasi aktor kebijakan sudah cukup baik dilihat dari terlaksananya koordinasi dan rekonsiliasi rutin namun partisipasi lainnya masih kurang seperti, monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan pengelolaan pasar dan rendahnya partisipasi juru pungut retribusi dalam mengawasi dan memantau hasil pemungutan, sedangkan partisipasi kelompok sasaran masih rendah karena ditemukan pedagang yang membayar tidak sesuai tarif dan terdapat pedagang pagi yang tidak membayar retribusi

pelayanan pasar. Kelima, sumber daya manusia kurang memadai karena rendahnya kompetensi juru pungut retribusi dalam menjalankan tupoksi dan ditemukan oknum juru pungut retribusi yang melakukan penyimpangan sehingga berdampak pada kebocoran pendapatan retribusi pelayanan pasar namun sumber daya non manusia dari tersedianya anggaran dan fasilitas sudah cukup memadai sedangkan komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran sudah cukup baik namun belum ada penyelenggaraan sosialisasi kebijakan sehingga berdampak pada rendahnya pengetahuan pedagang terhadap ketentuan pemanfaatan fasilitas pasar.

2. Faktor pendorong meliputi, koordinasi dan rekonsiliasi rutin antara pelaksana kebijakan, adanya petunjuk pelaksana sebagai pedoman kebijakan dan ketersediaan sumber anggaran dan fasilitas untuk menunjang kelancaran tugas. Faktor penghambat meliputi, rendahnya kuantitas dan kualitas SDM juru pungut retribusi, tidak lengkapnya data potensi perhitungan pasar, laporan administrasi keuangan tidak lengkap dan rendahnya mekanisme pengawasan kepala unit pasar terhadap hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan implikasi secara praktis dan teoritis sebagai berikut.

1. Implikasi Praktis

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Wage Purwokerto agar dapat memberikan kontribusi terhadap sumber peningkatan retribusi daerah maka Pengelola Pasar Unit Pasar Wage Purwokerto harus menambah jumlah SDM juru pungut retribusi, pendataan ulang perhitungan potensi Pasar Wage

Purwokerto, mengarahkan dan membimbing juru pungut retribusi agar melaksanakan tugas administrasi, meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar, mempertimbangkan inovasi sistem pemungutan *e-retribusi* dan melaksanakan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan rutin kepada pedagang tentang ketentuan pemanfaatan fasilitas pasar.

2. Implikasi Teoritis

Dalam rangka memberikan kontribusi bagi ilmu studi Administrasi Publik, penelitian ini memberikan wawasan baru yang berkaitan dengan tema implementasi kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dianalisis melalui perspektif *what's happening* dalam model implementasi kebijakan Ripley & Franklin (1986). Melalui perspektif *what's happening* dapat memberikan potret yang lebih jelas untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Wage Purwokerto sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pembaca.

